

## CHECKLIST UNTUK KBP dan KPKD (Untuk Tingkat Pemda Kabupaten/Kota)

KMW :  
 Kabupaten/Kota :  
 Tanggal Supervisi :  
 Supervisor :  
 Nara Sumber :

Topik	Pertanyaan	Informasi Yang didapat	Masalah Yang teridentifikasi
KPKD	Apakah KPKD sudah terbentuk ? ( kalau sudah kapan pembentukannya)		
	Apakah KPKD telah dikukuhkan oleh Walikota/Bupati ?		
	Apakah telah terdapat hubungan kegiatan antara KPKD dalam kegiatan KBP ?		
	Apakah terdapat anggota KPKD menjadi anggota KBP, serta bagaimana partisipasi yang dilaksanakan ?		
Kegiatan KBP	Apakah KBP telah dibentuk pada Kota/Kabupaten tersebut ? (jika YA)		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada penetapan/pengukuhan KBP, (waktu dan oleh siapa dikukuhkannya)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unsur-unsur apa saja yang menjadi anggota di KBP tersebut?</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentuk bentuk kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh KBP.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inisiatif/prakarsa yang paling aktif dalam kegiatan KBP dari unsur siapa</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah ada rekaman/dokumentasi kegiatan yang telah dilakukan KBPO.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permasalahan apa saja yang paling dominan dalam upaya optimalisasi KBP?</li> </ul>		
	Langkah-langkah kegiatan apa saja yang perlu dilakukan dalam mengoptimalkan KBP		
	Jika KBP belum terbentuk		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Faktor/kendala apa yang menyebabkan KBP belum dapat dibentuk pada Kota/Kabupaten</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tindakan apa yang dibutuhkan agar KBP dapat dibentuk dan dioptimalkan peran dan fungsinya</li> </ul>		

## CHECKLIST UNTUK KMW

KMW :  
 Tanggal Supervisi :  
 Supervisor :  
 Nara Sumber :

Topik	Pertanyaan	Informasi Yang didapat	Masalah Yang teridentifikasi
Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Manajemen dalam pelaksanaan kegiatan, khususnya terkait dengan dukungan pada pelaksanaan dan kerja Tim Fasilitator</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi Mobilisasi Fasilitator (tambahan)</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Realisasi kemajuan pelaksanaan yang terkait dengan schedule KMW,</li> </ul>		
Peningkatan Peran Pemda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pelaksanaan kegiatan Komunitas Belajar Perkotaan (KBP).</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ KMW memiliki bentuk dan pola koordinasi yang dikembangkan oleh KMW dalam upaya mendorong peran Pemerintah Daerah.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan bersama-sama dengan Pemda dalam pelaksanaan kegiatan. Aplikasi program SIM dapat dijalankan di KMW</li> </ul>		
SIM	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Proses input data SIM dilakukan oleh tim fasilitator di setiap karkot.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Kelengkapan Hard ware dan Software perangkat SIM di setiap Karkot.</li> </ul>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ketepatan waktu input dan pengiriman data SIM.</li> </ul>		

<b>Topik</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Status</b>	<b>Catatan</b>
Pemahaman tentang PS	Apa yang dimaksud Pemetaan swadaya ?		
	Apakah perlu dilakukan PS, mengapa ?		
	Siapa yang seharusnya berperan aktif dalam pelaksanaan PS ?		
	Siapa saja yang dapat memanfaatkan PS ?		
Kebutuhan Kelembagaan	Mengapa diperlukan kelembagaan masyarakat dalam upaya penggalangan potensi dan .....		
	Apakah lembaga yang ada sekarang ini sudah sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat ?, kalau ada, apa nama lembaga itu ?		
	Kalau memang diperlukan lembaga baru, apa alasannya ?		
	seperti apa lembaga yang diharapkan ?		
	Siapa yang seharusnya menetapkan bentuk , cara pemilihan, mengesahkan dan pertanggungjawaban kelembagaan Masyarakat ?		
Kebutuhan kepemimpinan	Siapa yang berhak menentukan seseorang menjadi pemimpin ?.		
	Pemimpin dengan kriteria seperti apa yang di harapkan masyarakat ?		

<b>Topik</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>Status</b>	<b>Catatan</b>
Kebutuhan kepemimpinan	Bagaiman cara untuk mendapatkan pemimpin dengan kriteria sesuai dengan harapan masyarakat ?		
	Sebenarnya siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin ?		

Catatan : Sebagai alat bantu pelaksanaan supervisi, apabila telah ditentukan lokasi Kelurahan/desa sasaran supervisi, KMW/Korkot agar menyediakan data Format 13 dalam buku Kerangka Pelaksanaan Pendampingan Pemetaan Swadaya. (Status kemajuan kegiatan pendampingan pemetaan swadaya (PS) tim Fasilitator),

## DAFTAR PERIKSA

(Digunakan apabila lokasi supervisi telah memulai proses pemilihan BKM)

KMW :  
 Kabupaten/Kota :  
 Kecamatan :  
 Kelurahan/Desa :  
 Tanggal Supervisi :  
 Supervisor :

Topik	Pertanyaan	Status	Catatan
Pemahaman kebutuhan Lembaga	Kenapa harus ada BKM ?		
	Apa yang diharapkan dengan adanya BKM ?		
	Siapa saja yang dapat menjadi anggota BKM		
Pemilihan BKM	Apakah AD-BKM dan Tatib Pemilihan anggota BKM sudah dibahas secara berjenjang dari RW s.d kelurahan dan disahkan dalam pertemuan pemilihan anggota BKM		
	Apakah telah dilakukan pemilihan utusan di setiap RT (kelompok basis terkecil) serta hasilnya telah disebarluaskan ke seluruh warga masyarakat secara transparan dan benar		
	Apakah dalam pemilihan utusan di setiap RT (kelompok basis terkecil) diikuti minimal 30 % penduduk dewasa warga RT masing-masing		
	Apakah dalam pemilihan anggota BKM di tingkat kelurahan/desa diikuti minimal 2 % penduduk dewasa kelurahan/desa.		
	Apakah ada warga yang tidak terpilih sebagai utusan RT , yang ikut memilih dan dipilih sebagai anggota BKM		
	Apakah kriteria anggota BKM yang disepakati adalah berdasarkan nilai kemanusiaan		

Topik	Pertanyaan	Status	Catatan
Pemilihan BKM	Apakah ada kuota (pembagian komposisi) untuk keanggotaan BKM		
	Apakah ada kampanye yang dilakukan seseorang/kelompok dalam pemilihan anggota BKM		
	Apakah ada sistem perwakilan dalam pemilihan anggota BKM		
	Apakah ada pencalonan dalam pemilihan anggota BKM (dicalonkan dulu sebelum dipilih)		
	Apakah ada penunjukan dalam pemilihan anggota BKM		
	Apakah pemilihan anggota BKM dilakukan secara langsung dan tertutup		
	Apakah anggota BKM terpilih secara langsung dilantik oleh Panitia Pendirian BKM dan dikukuhkan Lurah/Kades dengan disaksikan masyarakat yang hadir saat itu		
	Apakah kepada anggota BKM terpilih telah diserahkan mandat hasil Pemetaan Swadaya dan AD BKM yang telah disahkan dan ditandatangani bersama		
Motifasi anggota BKM	Apa yang mendorong mau menjadi anggota BKM ?		
	Dengan tanggung jawab yang besar dan kesibukan dalam pelaksanaan kegiatan, apakah anggota BKM perlu mendapat Honorarium/jasa lain dalam bentuk materi?		